

**EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN DI KANTOR PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PROVINSI JAWA TIMUR**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

PUTRI RISTA DEVINA

NIM : 2012410269

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Putri Rista Devina
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Desember 1993
NIM : 2012410269
Progam Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Progam Studi : Akuntansi
Judul : Evaluasi Sistem Penggajian di Kantor Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Provinsi Jawa Timur

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Ketua Progam Diploma

Dosen Pembimbing

Tanggal: 17 Maret 2015

Tanggal: 17 Maret 2015



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Bayu Sarjono, SE, Ak, MAk, CA, BKP

LATAR BELAKANG

Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan pegawai sehingga harus diberi perhatian khusus oleh instansi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya. Suatu instansi pemerintahan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik, karena bila instansi pemerintahan tersebut tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik, akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing.

Realisasi Belanja Gaji pegawai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim pada tahun 2013 sebesar 16.653.941.337 yang terdiri dari belanja gaji pokok dan tunjangan-tunjangan. Dengan angka yang tidak sedikit tersebut diperlukan pengelolaan yang baik, tertib, dan teratur. Penerapan sistem penggajian yang benar dan keterpaduan dari berbagai fungsi yang terkait, diharapkan dapat mengatasi adanya resiko kecurangan dan penyelewengan terhadap sistem penggajian.

TUJUAN

Tujuan penyusunan tugas akhir adalah untuk mengkaji dan mengetahui penerapan sistem penggajian serta untuk mendapatkan gambaran dan informasi lebih lanjut mengenai sistem penggajian yang dilakukan oleh kantor perwakilan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Timur.

KEGUNAAN PENGAMATAN

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai evaluasi sistem penggajian pada BPKP provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah ada mengenai sistem penggajian pada BPKP provinsi Jawa Timur.

3. Bagi pihak lain (pembaca)

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi yang mengambil TA dengan permasalahan yang hampir sama, serta bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian ini.

METODE PENGAMATAN

Berbagai metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Studi Pustaka

Metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan sumber dengan cara mengumpulkan bahan, membaca dan mempelajari berbagai sumber teks

,buku, makalah, serta undang-undang atau peraturan yang terkait dengan pembahasan laporan studi lapangan ini. Penelitian Lapangan

Terdiri dari dua metode yaitu:

a. Observasi

Yaitu metode dengan mengamati langsung pada obyek studi lapangan dengan mempelajari dokumen-dokumen, dasar, dan kegiatan dalam sistem penggajian di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.

b. Wawancara/Interview

Yaitu metode yang dilakukan di lapangan dengan berbicara kepada narasumber/orang/bagian unit kerja yang terkait dengan sistem dan prosedur penggajian di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur.

SUBYEK PENGAMATAN

Subyek pengamatan adalah pejabat/petugas yang berkaitan dengan sistem penggajian yang ada di BPKP Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/Kuasa PA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM
4. Bendahara Pengeluaran
5. Petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG)

RINGKASAN PEMBAHASAN

kerangka sistem penggajian pegawai di BPKP JATIM akan dijelaskan sebagai berikut:



KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan adalah Hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap sistem penggajian pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur diketahui Standard Operating Procedure (SOP) telah diterapkan, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja BPKP Jawa Timur untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan, penulis mencoba untuk memberikan saran diantaranya:

1. kekurangan petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG), bisa dilakukan dengan melakukan penambahan pegawai dan/atau realokasi pegawai dengan bagian lain yang kelebihan pegawai demi mempercepat pengerjaan gaji pegawai setiap bulannya.
2. Lebih meningkatkan integrasi antar sistem pada tiap-tiap subbagian. Seperti untuk subbagian kepegawaian dengan petugas PDG dalam perekaman data dan perubahan-perubahan yang terjadi sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.
3. BPKP provinsi Jawa Timur sebaiknya membuat flow chart mengenai Belanja Gaji Pegawai agar uraian prosedur dapat dipahami lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawat. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses, dan Penerapan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
- Arya Pratama. 2012. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil pada KPPN Magelang*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Astutik, Eva Fidiya. 2010. *Peranan Sistem Penggajian Dalam menunjang efektivitas Perusahaan Pada PT. Mutual Persada*. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. <http://www.bpkp.go.id/jatim/konten/660/Kedudukan-Tugas-Pokok-dan-Fungsi.bpkp> (diakses 20 Agustus 2014)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 2009. *Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja*. Digandakan: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Sidoarjo. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fatmawati. 2007. *Sistem Penggajian Pada PT. PAL Indonesia*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- James, A. Hall, 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,
- Moh. Mahsun., Firma, S., dan Heribertus, A.P. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
-, 2013. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Neunar, Jhon. J. W. 1997. *Sistem Akuntansi (Accounting System Inflation)*. Edisi Kelima. English Edition New York. Richard D Irwin Inc.
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-37/PB/2009 tentang *Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2009

Romney, B. Marshall, dan Paul John Steinbart. 2006. *Accounting Information System*. Tenth Edition, New Jersey: Prentice Hall Publishing

Soemarso.S.R.2009 *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta :RinekaCipta.

ZakiBaridwan. 2013. Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : BPEE UGM.